



# Jangan Terpaku Pembangunan Fisik Saja

**SUKADANA-RK**, Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid meminta kepada seluruh pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Kayong Utara (KKU), jangan hanya memperhatikan pembangunan fisik saja. Namun juga pembangunan manusia supaya menjadi lebih baik dan berdayaguna, demi peningkatan kesejahteraan bersama.

“Pembangunan di desa jangan hanya semata-mata yang bersifat fisik saja. Akan tetapi juga harus memperhatikan pembangunan masyarakatnya. Pihak pemda nantinya akan mengatur masalah gaji aparatur desa dan BPD (Badan Penyusyawaratan Desa) dengan mengeluarkan Peraturan Bupati. Hal ini dilakukan supaya kemudian hari tidak terjadi permasalahan,” kata H Hildi Hamid.

Sedangkan, Sekretaris BPPM-DPKB, Masdar mengatakan hal yang perlu dan mesti dilakukan para kepala desa (Kades), adalah dengan seringnya mengadakan evaluasi penyelenggaraan Pemdes. Supaya Kades mengetahui seluruh aspek yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga dan personil aparaturnya.

“Sampai November 2014 lalu, masih ada 17 desa yang belum menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), padahal tahun sebelumnya hanya ada lima desa saja, yang mana pada saat itu dana yang diberikan kepada desa hanya berjumlah Rp200 juta. Apalagi dengan dana yang nanti akan dikucurkan lebih dari Rp1 miliar. Para kepala desa harus paham dan mengerti bagaimana menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa,” pintanya Masdar.

Karena, sambungannya, menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan kata lain, dana yang besar tersebut harus bisa meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa, bukan untuk aparaturnya maupun pemerintah desa.

“Dengan besar dan banyaknya sumber pendapatan desa tersebut, tentunya akan lebih membuat para kepala desa harus lebih mudah membangun desanya. Atau sebaliknya, dengan hal tersebut akan banyak para kepala desa yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegas Masdar. (Hud)